SAMBUTAN MENTERI KEUANGAN

WEBINAR SOSIALISASI ARAH KEBIJAKAN DAK, DID, DAN APBD 2022 UNTUK PERCEPATAN PENURUNAN *STUNTING*

JAKARTA, 24 MEI 2021

[1420 *words* = 11 *minutes*]

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

Selamat Pagi, Salam Sejahtera,

Om Swastiastu, Namo Buddhaya,

Salam Kebajikan, Salam Sehat

Yang Saya Hormati:

1. **Deputi Kebijakan Pembangunan Manusia dan Pemerataan Pembangunan, Setwapres, Bp. Suprayoga Hadi;**
2. **Tim Percepatan Pencegahan Anak Kerdil - Sekretariat Wakil Presiden**
3. **Para Pejabat pada Kementerian/Lembaga terkait;**
4. **Seluruh Narasumber/Pembicara;**
5. **Para Kepala Bappeda dan Organisasi Perangkat Daerah di seluruh Provinsi/Kabupaten/Kota; serta**
6. **Para wartawan serta seluruh hadirin dan tamu undangan yang berbahagia;**

[Pembukaan – Kondisi Prevalensi *Stunting* di Indonesia]

1. **Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa,** karena atas berkat limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul pada hari ini dalam acara "**Webinar Sosialisasi Arah Kebijakan DAK, DID, dan APBD 2022 untuk Percepatan Penurunan *Stunting*"** yang diselenggarakan Sekretariat Wakil Presiden (Setwapres) secara *virtual*.
2. Selama lebih dari 1 tahun, pandemi **Covid-19 telah menjadi bencana global.** Keberadaan pandemi **berdampak** terhadap sendi-sendi kehidupan masyarakat **mulai dari sisi kesehatan, sosial, hingga perekonomian**. Dampak sosial dan ekonomi selama **pandemi akan memperburuk permasalahan gizi anak.** Pandemi Covid-19 juga menambah tantangan Pemerintah dalam upaya menurunkan **prevalensi *stunting* menjadi 14% pada tahun 2024** sebagaimana yang tertuang dalam RPJMN 2020-2024.
3. **Pandemi Covid-19 menghambat kegiatan-kegiatan pencegahan *stunting***, antara lain terganggunya layanan kepada masyarakat akibat *social* dan *physical distancing* (Posyandu, kelas Ibu Hamil, Bina Keluarga Balita/BKB, PAUD), akses penduduk miskin terhadap pangan terganggu karena hambatan produksi/distribusi, dan berkurangnya daya beli masyarakat terhadap pangan bergizi dan layanan, serta bertambahnya angka kemiskinan.
4. Data tahun 2019 menunjukkan bahwa angka **prevalensi *stunting* di Indonesia telah mengalami penurunan, namun masih menunjukkan persentase yang cukup tinggi yaitu sebesar 27,7 persen.** Hal ini menempatkan Indonesia pada peringkat ke-2 terbawah di Asia Tenggara dan ke-25 di dunia.

5. Pada tahun 2020, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat peningkatan persentase kemiskinan sebesar 10,19 persen, **meningkat 0,97 persen poin dibandingkan tahun sebelumnya.** Hal ini menjadi ”*warning*” bagi Pemerintah, mengingat **kemiskinan merupakan faktor penting penyebab terjadinya *stunting* pada anak balita**. Rumah tangga yang miskin tidak dapat memenuhi asupan gizi untuk anaknya sehingga anak tersebut menjadi *stunting*.

6. **Koordinasi dan sinergi semua pihak sangat penting untuk mengatasi permasalahan *stunting* di Indonesia.** Strategi Nasional Percepatan Pencegahan Anak Kerdil (*Stunting*) / Stranas *Stunting* yang merupakan acuan pelaksanaan program percepatan pencegahan *stunting* perlu dilakukan penyesuaian dengan upaya-upaya tambahan untuk mengurangi dampak pandemi terhadap capaian penurunan *stunting*.

7. **Koordinasi dan sinergi antar K/L, antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Pemda), dengan melibatkan seluruh *stakeholder* terkait, swasta, akademisi, media, dan masyarakat hingga ke tingkat desa,** harus berkomitmen melakukan upaya yang nyata, fokus dan komprehensif untuk mempercepat penanganan *stunting*. Upaya-upaya tersebut dilakukan dengan memperluas konvergensi program/kegiatan di tingkat Kabupaten/Kota hingga di level Desa, meningkatkan kualitas dan efektivitas implementasi program, meningkatkan cakupan dan kualitas pangan, serta perlindungan sosial yang berkontribusi terhadap penurunan *stunting*.

[Konteks – Dukungan APBN dalam mengatasi *stunting*]

Bapak/Ibu dan para hadirin yang berbahagia,

8. **Pemerintah telah memberikan dukungan pendanaan untuk pencegahan *stunting*,** baik melalui mekanisme Belanja Kementerian/Lembaga (K/L), maupun melalui mekanisme Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD).

9. Pada tahun **2020, belanja APBN untuk K/L dialokasikan terutama untuk 20 K/L** yang bertanggung jawab untuk mencapai 86 *output* dalam rangka mendukung penurunan *stunting* di 260 kabupaten/kota. Begitu tersebarnya anak-anak yang mengalami *stunting* sehingga perlu diberikan perhatian oleh seluruh pihak.

10. **Belanja K/L pada APBN 2020 mengalami kenaikan, yang semula dianggarkan Rp27,5 T meningkat menjadi Rp39,8 T**, dengan rincian sebesar Rp1,4 T untuk intervensi spesifik, Rp37,9 T untuk intervensi sensitif, dan Rp0,5 T untuk dukungan dan koordinasi. Diharapkan **anggaran yang besar menghasilkan dampak manfaat** yang dapat mengurangi anak-anak Indonesia mengalami *stunting*.

11. Adapun **pendanaan yang diberikan melalui TKDD telah disusun dengan desain transfer yang konvergen** untuk mengintegrasikan berbagai sumber TKDD dalam penanggulangan stunting melalui **penerbitan PMK Nomor 61/PMK.07/2019** tentang Pedoman Penggunaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa untuk Mendukung Pelaksanaan Kegiatan Intervensi Pencegahan *Stunting* Terintegrasi. **Dengan adanya PMK tersebut, proses perencanaan dan penganggaran pengalokasian TKDD dapat dilakukan secara terintegrasi** antar berbagai sumber TKDD dengan fokus alokasi penanganan *stunting* yang terkoordinasi. **PMK ini sekaligus memberikan panduan bagi**

Pemerintah Daerah dalam melaksanakan konvergensi pendanaan untuk penanggulangan *stunting* di daerah.

12. **Transfer Keuangan Daerah dan Dana Desa (TKDD) pada APBN 2020 dilakukan** dengan mengalokasikan **DAK Fisik sebesar Rp1,9 T dengan realisasi senilai Rp1,8 T** untuk bidang air minum, kesehatan, dan sanitasi. Untuk **DAK Non Fisik sebesar Rp2.7 Triliun** dan memiliki realisasi dengan nilai yang sama untuk Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) *Stunting* dan Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB).
13. **Pada tahun 2021, pagu awal belanja untuk K/L di APBN 2021 dialokasikan sebesar Rp32,98 T** sebagai dukungan anggaran untuk pencegahan *stunting* tahun 2021. Untuk TKDD, selain penambahan alokasi anggaran **DAK Fisik menjadi sebesar Rp7,35 T,** dukungan pencegahan *stunting* semakin diperluas, dengan **menambah Bidang Lingkungan Hidup untuk DAK Fisik.**
14. **Anggaran DAK Non Fisik dialokasikan sebesar Rp 4.1 T** dan adanya **penambahan Jenis Ketahanan Pangan serta Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) PAUD untuk DAK Non Fisik** sebagai dukungan pencegahan *stunting*. Adapun, **dukungan Dana Insentif Daerah (DID) dalam pencegahan *stunting* dilakukan sejak 2018 dengan memasukkan variabel *stunting* dalam perhitungan pemberian DID**. Dari tahun 2018 hingga tahun 2021, Pemerintah **telah mengalokasikan DID untuk kategori *stunting* sebesar Rp3,84 Triliun.**
15. **Anggaran yang sedemikian besar ini merupakan tanggung jawab semua pihak baik K/L maupun Pemerintah Daerah** agar betul-betul bisa menghasilkan dampak penurunan *stunting* bagi anak-anak Indonesia, dengan saling berkoordinasi dan berkolaborasi karena *stunting* tidak bisa diselesaikan oleh satu K/L atau satu daerah.

[Penutup – Peran seluruh pihak dalam mengatasi *stunting*]

Bapak/Ibu dan para peserta webinar yang berbahagia,

16. Manusia adalah aset yang sangat penting bagi suatu negara dan **persoalan *stunting* bukan persoalan ibu dari anak-anak itu sendiri namun merupakan persoalan multidimensi,** oleh karena itu Pemerintah harus saling sinergi dan bekerjasama baik antara K/L dan Pemerintah Daerah. Terlebih di tengah pandemi Covid-19 yang membuat tantangan ini makin besar dimana anak-anak semakin mengalami keterpurukan dari sisi kekurangan gizi.
17. **Pemerintah terus meningkatkan kemampuan** dalam menangani faktor resiko dasar dari terjadinya kasus *stunting* yaitu pendapatan, akses pelayanan kesehatan dan lingkungan tempat tinggal sehingga faktor resiko dasar tersebut harus ditangani bersama-sama. **Pemerintah akan terus meningkatkan kualitas program** dan mendukung percepatan stunting agar target penurunan stunting pada tingkat 14% pada tahun 2024 dapat tercapai.
18. **Intervensi penanganan stunting makin luas** cakupannya yang dimulai pada tahun 2018 dengan 100 Kabupaten/Kota dan **pada tahun 2021 ini meningkat ke 360 Kabupaten/Kota**, sehingga diharapkan 514 Kabupaten/Kota di tahun 2022 bisa menangani *stunting* secara efektif.
19. Pelaksanaan upaya penurunan *stunting* di daerah masih mengalami **beberapa kendala dan tantangan**. Salah satu tantangan utama yang perlu mendapatkan perhatian adalah **kurangnya koordinasi lintas sektor dan kurangnya pemahaman daerah dan desa atas program-program penanggulangan *stunting*.** Untuk itu, **peran Pemerintah Daerah sangat penting untuk terus mendorong program *stunting* sebagai prioritas utama**, dan kepada **Gubernur/Walikota/Bupati agar dapat memberikan**

arahan kepada seluruh dinas dan organisasi perangkat daerah untuk memahami, mengenali, dan berkomitmen untuk menangani *stunting* ini.

20. **Penguatan program yang saling terintegrasi antara satu dinas dengan dinas yang lain sangat diperlukan**, sehingga program tersebut dapat fokus pada suatu tujuan tertentu dan memiliki indikator capaian kinerja yang jelas dan terukur. **Pemerintah Daerah juga harus memiliki inovasi** bagaimana menangani masalah yang begitu kompleks dan multidimensi ini.
21. **Komitmen dan sinkronisasi di daerah ini harus tercermin dalam pendanaan APBD.** Pendanaan dalam APBD tersebut juga harus disinergikan dengan dukungan dari Pemerintah Pusat, baik melalui belanja K/L maupun TKDD. Dengan demikian, berbagai sumber dana tersebut dapat memberikan hasil yang paling optimal dalam upaya penurunan *stunting*.
22. **Langkah-langkah dan tindakan, program serta kebijakan yang diperlukan dalam menangani *stunting* harus jelas**, terpenting juga untuk mendapatkan **data yang akurat** yang diharapkan dapat men-*tracking* dan melakukan pemberdayaan masyarakat sehingga dapat menyasar ibu hamil, dan para balita **sehingga mereka bisa menjadi target penerima program dan bisa mendapatkan manfaat maksimal.**
23. **Dalam rangka monitoring dan evaluasi pelaksanaan penanganan *stunting***, Pemerintah juga meminta kepada **Daerah dan Desa untuk secara aktif menyampaikan laporan konvergensi pencegahan *stunting***. Hal ini diperlukan bukan untuk menambah beban administratif Pemerintah Daerah, namun untuk **memastikan bahwa dana yang telah dikeluarkan benar-benar memberikan hasil sesuai target dan sasaran** yang telah ditetapkan sebelumnya.

24. **Peran sektor swasta, akademisi, masyarakat dan media, juga sangat penting** tidak hanya untuk memberikan informasi namun untuk edukasi dan memberikan motivasi. Bukan hanya untuk **menyelamatkan anak-anak yang akan menjadi pemegang obor estafet bagi pembangunan Indonesia ke depan**, namun mereka adalah generasi yang akan menghadapi tantanganke depan yang semakin pelik. Oleh karena itu, saat ini seluruh komponen bangsa harus bersinergi, bekerjasama, dan berkolaborasi untuk menyelamatkan generasi muda kita dari *stunting*.

Sekian dan terima kasih.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

SRI MULYANI INDRAWATI
MENTERI KEUANGAN RI